

Menuju Jurnalisme Bencana

Muzayin Nazaruddin
Staf Pengajar Ilmu Komunikasi UII

Artikel ini pernah dimuat di Harian Bernas Jogja, 10 Mei 2007

Berbagai kelemahan dalam praktik jurnalisme bencana yang penulis bahas dalam artikel berjudul Kritik Jurnalisme Bencana (Bernas Jogja, 19 April 2007) meninggalkan sebuah pertanyaan penting: faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya kualitas jurnalisme bencana?

Setidaknya terdapat dua faktor yang ‘mungkin’. *Pertama*, masih rendahnya ketrampilan jurnalistik wartawan-wartawan Indonesia, terutama ketika meliput bencana. *Kedua*, faktor yang lebih mendasar, ideologi kapital-komersial yang telah mengakar dalam setiap aktifitas media dan jurnalistik, menjadi ideologi dominan para pengelola media, termasuk pekerjanya.

Agenda-agenda

Terkait dua kemungkinan tersebut, penulis mengajukan beberapa agenda. *Pertama*, penelitian komprehensif dan mendalam tentang praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis isi atas berita-berita bencana, tapi lebih jauh berusaha mengungkap praktik produksinya.

Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dengan tiga level analisis yang lengkap menjadi sebuah pilihan metodis yang tepat. Level pertama, analisis teks berita-berita bencana secara kritis. Kedua, analisis kognisi sosial dan relasi kuasa dalam proses produksi berita-berita bencana, melalui wawancara mendalam dengan para wartawan dan pengelola media yang terlibat dalam produksi berita bencana. Ketiga, analisis diskursus bencana yang beredar di masyarakat, dengan penelusuran literatur dan wawancara mendalam dengan pakar-pakar terkait.

Kedua, pengadaan panduan dan kode etik jurnalisme bencana. Rendahnya peran informatif media dalam bencana adalah konsekuensi logis ketiadaan kesepakatan kolektif tentang bagaimana memberitakan bencana (Masduki, UNISIA, 2007). Saat ini, pedoman yang ada hanyalah prinsip-prinsip atau tips-tips singkat meliput di wilayah bencana, tersebar di berbagai literatur, yang bisa jadi tidak populer di kalangan para jurnalis. Kondisi ini adalah sebuah lubang besar karena Indonesia adalah negeri rentan bencana. Seharusnya ada panduan jurnalisme bencana, seperti halnya ada panduan jurnalisme di wilayah konflik dan perang.

Seperti dalam penyusunan KEWI atau Kode Etik Jurnalistik, peran Dewan Pers dan asosiasi-asosiasi jurnalis sangat vital dalam proses penyusunan panduan dan kode etik jurnalisme bencana ini. Sinergis dengan agenda pertama, hasil-hasil penelitian dari para akademisi tentang jurnalisme bencana dapat menjadi masukan penting bagi penyusunan panduan dan kode etik jurnalisme bencana ini.

Ketiga, pelatihan jurnalisme bencana bagi wartawan Indonesia secara berkelanjutan. Asumsinya, rendahnya kualitas jurnalisme bencana lebih disebabkan faktor ketrampilan para jurnalis yang masih rendah. Namun, jika ternyata faktor penyebabnya adalah ideologi kapital-komersial wartawan dan pengelola media, keberadaan panduan dan kode etik jurnalisme bencana akan menjadi batasan ‘etis’ yang sangat penting, tentunya dengan komitmen tinggi untuk melaksanakannya.

Prinsip-prinsip

Sebagai sebuah kajian pengantar, penulis mengajukan beberapa normatif: prinsip-prinsip dan fase-fase pemberitaan bencana.

Prinsip-prinsip penting dalam jurnalisme bencana adalah akurasi, humanisme, komitmen menuju rehabilitasi, serta kontrol dan advokasi (Yusuf, Jurnal Komunikasi, 2006; Masduki, UNISIA, 2007; Stepankowsky dan Seifert dalam Andersen dan Itule, 1984; Hight dan McMahon, 2006; Rahayu, Polysemia, 2006; Amiruddin, Suara Merdeka, 26 Januari 2007).

Prinsip akurasi. Karenanya tanggungjawab pertama dan utama media setelah terjadi bencana adalah meluruskan informasi dan menjelaskan apakah rumor yang berkembang merupakan fakta atau bukan. Dalam suasana ketidakpastian, media justru dapat meresahkan dan menakuti masyarakat jika informasi yang disajikan berlebihan dan tidak akurat. Sebaliknya, media dapat menenangkan masyarakat jika informasi yang diberikan akurat dan lengkap, termasuk informasi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat dalam kondisi darurat. Cek dan cek ulang pada berbagai sumber informasi sangat diperlukan untuk memilah mana informasi yang akurat, mana yang hanya rumor. Karena itu, reportase bencana hendaknya dilakukan oleh tim peliput, mengingat besarnya kejadian dan kebutuhan perencanaan yang matang.

Prinsip humanisme, khususnya prinsip suara korban. Media harus menyediakan ruang setara bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak-anak, untuk berekspresi, tidak hanya pejabat negara. Secara etis, wartawan tidak boleh menambah penderitaan orang yang sedang dalam kondisi gawat darurat dengan cara dipaksa untuk diwawancarai. Selain itu, wartawan harus menghormati peraturan mengenai akses media yang dibuat oleh rumah sakit atau institusi medis lainnya.

Prinsip komitmen menuju rehabilitasi. Secara mendasar, peliputan subjek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya. Paskabencana, media harus menginisiasi masyarakat untuk melupakan masa lalu yang kritis dan menyeramkan, menatap masa depan dan bangkit, serta menyuguhkan berbagai solusi praktis yang secepatnya bisa dilakukan. Dalam fase ini, media juga bisa menjadi wadah bagi proses penemuan kembali antar anggota keluarga yang terpisah (*lost and found*).

Prinsip kontrol dan advokasi. Media harus menjadi *watchdog* bagi pihak-pihak penyalur bantuan bencana, bukannya malah berlomba-lomba menyalurkan bantuan bencana sebanyak-banyaknya.

Beberapa prinsip tersebut harus benar-benar diperhatikan media ketika meliput bencana, dalam seluruh fasenya: prabencana, pada saat terjadi bencana, dan paskabencana (Yusuf, Jurnal Komunikasi, 2006; Masduki, UNISIA, 2007; Hight dan McMahon, 2006).

Fase prabencana berlangsung sepanjang waktu. Muatan paling penting dalam kampanye berkelanjutan ini adalah pengingat terus menerus bahwa masyarakat Indonesia hidup di negeri yang rawan bencana sehingga mereka selalu waspada, namun tetap tenang. Media harus menjadi bagian penting dalam *early warning system*. Selain itu, media harus berperan dalam kampanye hidup sehat dan peduli lingkungan, yang tentu saja akan meminimalisir bencana-bencana antropogen yang lebih disebabkan ulah manusia.

Saat terjadi bencana, media harus menyediakan informasi dasar yang akurat tentang jenis dan sumber bencana serta cara-cara menyelamatkan diri.

Pada fase paskabencana, media harus menunjukkan komitmen kuat menuju rehabilitasi. Fase ini terbagi tiga, darurat, *recovery* dan rehabilitasi. Pada fase darurat, keakuratan media sangat diperlukan dalam informasi dasar peta kawasan bencana, cara

memperoleh dan memberikan bantuan logistik, serta lokasi-lokasi pengungsian. Memasuki fase *recovery*, media mulai perlu menyoroti mekanisme pendanaan kerugian dan penyaluran bantuan, menggalakkan kampanye bangkit serta gerakan penemuan keluarga. Berlanjut dalam fase rehabilitasi, media harus menjadi *watchdog* bagi distribusi bantuan, pembangunan kembali kerusakan fisik, bantuan rumah dan usaha produktif.

Sebagai penutup, dalam setiap peristiwa bencana, masyarakat menggantungkan informasi kepada media massa. Kuasa informasi yang besar ini seharusnya dimanfaatkan media untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi publik tentang bencana. Dalam bencana antropogen, edukasi tersebut menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya bencana. Dalam bencana alam, edukasi media tersebut sama sekali tidak bisa dan tidak ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana, namun sangat vital untuk menjaga kewaspadaan dan ketenangan masyarakat serta meminimalisir jumlah korban ketika terjadi bencana, baik korban jiwa maupun kekayaan.